

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan-perusahaan pada masa kini mengalami pergeseran paradigma. Perusahaan tidak satu-satunya mempunyai tujuan utama dalam menghasilkan laba, namun perusahaan harus mempertimbangkan kehidupan generasi yang akan datang didalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perusahaan tidak lagi berorientasi pada *profit* tetapi juga mempertimbangkan lingkungan (bumi). Paradigma bisnis mengacu pada *triple p (profit, people, planet)* (Suryono dan Prastiwi, 2011).

Perubahan paradigma tersebut membentuk konsep bisnis yang tidak hanya memikirkan mengenai keuntungan yang maksimal saja akan tetapi juga harus menguntungkan manusia dan lingkungannya saja biasanya ini disebut dengan konsep *sustainability management*, atau *corporate social responsibility*, atau *corporate citizenship*. Dalam penerapannya timbul masalah dalam mengukur keberhasilan pengimplementasian dari *sustainability management*. Tujuan perusahaan menerapkan konsep *sustainable management* menurut (Darwin, 2006 dalam Sri dan Syam, 2013) yaitu untuk menunjukkan kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, membangun kepercayaan, dan komunikasi dengan *stakeholder*, mengurangi resiko korporat dan melindungi nama baik (*image*), analisa investasi pada investor, memiliki daya saing yang

tinggi dalam pemrolehan pinjaman, sumber daya manusia, dan pemasok. Dalam perspektif akuntansi, cara yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja praktek *sustainability management* adalah dengan membuat *sustainability reporting*. *Sustainability reporting* itu sendiri merupakan sebuah praktik pengungkapan perusahaan terdapat beberapa elemen penting yang terdiri dari 6 aspek pengungkapan yang terdiri dari aspek kinerja ekonomi, aspek kinerja lingkungan, aspek praktik tenaga kerja dan perkerjaan yang layak, aspek hak-hak manusia, aspek masyarakat, dan aspek tanggung jawab produk (Sri dan Syam, 2013).

Pendapat di atas diperkuat dengan adanya berbagai survei. Survei PWC terhadap CEO global 2003 tentang CSR menyatakan bahwa 79% dari lebih 1000 CEO di 33 negara mengakui bahwa “*sustainability is vital to the profitability of any company*”. Survei lainnya yang dilakukan terhadap 350 perusahaan besar di Eropa melaporkan bahwa 78% dari eksekutif mengakui bahwa “*integrating responsible business practices make a company more competitive*”. Kondisi inilah yang menyebabkan perusahaan menerapkan praktek *sustainability management*. (Chariri, 2009; dalam Sri dan Syam, 2013).

Pengungkapan dalam pelaporan tahunan terbagi menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Menurut peraturan pemerintah yang dikeluarkan melalui keputusan ketua BAPEPAM No. SE-02/PM/2002 yang berisi tentang pedoman penyajian dan

pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, pengungkapan wajib merupakan syarat minimum pengungkapan yang didasari oleh standar akuntansi berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang relevan digunakan oleh pemakai laporan tersebut untuk membuat suatu keputusan. Jika dikategorikan melalui jenis kelompok pengungkapan maka *sustainability reporting* termasuk dalam kategori pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Sri dan Syam, 2013).

*The Global Reporting Initiative (GRI)* yang berlokasi di Belanda dan pemegang otoritas lain di dunia, berusaha mengembangkan “*framework for sustainability reporting*”. Pedoman pelaporan yang telah dihasilkan dinamakan *G3 Guidelines* (Dilling, 2009). Perusahaan-perusahaan yang telah menerbitkan *sustainability reporting* berdasar *G3 guidelines* diharapkan dapat memenuhi beberapa indikator pelaporan, yakni dalam hal profil organisasi, indikator kinerja, dan pendekatan manajemen (GRI 2009B).

*Global Reporting Initiative* meluncurkan standar pelaporan keberlanjutan pertama kali pada tahun 2000. Hingga saat ini *Global Reporting Initiative* telah menyempurnakan standar pelaporan keberlanjutan yang diterbitkan pada tanggal 22 mei 2013 di Amsterdam. Standar ini disebut *G4* yang berisi perubahan signifikan dari standar sebelumnya yang sangat penting dalam pembangunan keberlanjutan yaitu pertama, fokus pada isu-isu material. Meskipun

standar ini memiliki berbagai aspek, para pengguna sebaiknya menguji aspek mana yang material untuk dilaporkan. Untuk aspek-aspek yang dinilai material dilaporkan secara mendalam, sedangkan aspek-aspek yang dinilai kurang material akan tetap dilaporkan, namun lebih dangkal. Kedua, G4 menghilangkan level aplikasi A, B, dan C yang ada pada standar sebelumnya karena dinilai menyebabkan para organisasi pelapor menginginkan level A dengan beranggapan bahwa level A berarti berkinerja tinggi, sehingga organisasi pelapor berlomba-lomba untuk membuat laporan keberlanjutan setebal mungkin hingga yang tidak penting dilaporkan.. Padahal level hanya menandai jumlah indikator yang dilaporkan. Oleh sebab itu, G4 membuat dua skema “*in accordance*”. Skema pertama adalah “Inti”, yang berarti pelapor akan memilih minimal 1 indikator di setiap aspek yang material untuk dilaporkan. Sedangkan pada skema kedua, “Komprehensif”, seluruh indikator di setiap aspek yang material akan dilaporkan. Ketiga, perubahan pada ekspansi batas-batas pelaporan. Pada generasi sebelumnya pusat utama yang harus dilaporkan adalah sebatas pada kinerja organisasi. Perubahan yang terjadi dalam G4 yang harus dilaporkan adalah sepanjang mata rantai nilai, berarti setiap organisasi pelapor diharuskan mengulas kinerja keberlanjutan dimulai dari rantai pasokan hingga rantai pasarnya, hingga pemanfaatan produknya oleh konsumen. Hal ini terlihat dari penambahan indikator baru yang memasukkan konsideran rantai nilai dalam dampak lingkungan, ketenagakerjaan, HAM, dan

masyarakat. Keempat, penekanan pada unsur tata kelola serta etika. G4 sangat menekankan pada pelaporan rasio remunerasi antar-tingkat pekerja dengan maksud untuk mendorong pengurangan ketimpangan remunerasi yang selama ini semakin parah (Pelaporan Keberlanjutan dan Indonesia, 2013).

Pengungkapan *sustainability reporting* di berbagai negara, termasuk Indonesia masih bersifat *voluntary*, artinya tidak ada aturan yang mewajibkan seperti halnya pada penerbitan *financial reporting* yang wajib di laporkan oleh perusahaan (Utama, 2006, dalam Tjoenardy, 2010). Di Indonesia, studi mengenai *sustainability reporting* masih sangat jarang diteliti. Dalam hal ini, *sustainability reporting* dikaitkan dengan karakteristik perusahaan di mana meliputi profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan, teori *stakeholder* dan teori legitimasi. Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara pihak yang mendelegasikan keputusan (*principal*) dengan pihak yang menerima pendelegasian (*agent*). *Principal* merupakan pemilik atau pemegang saham, sedangkan manajemen dianggap sebagai pihak yang akan berupaya memaksimalkan kegiatan operasi perusahaan dan tetap berusaha memenuhi kontrak yang disebut *agent* (Suwardjono, 2008:485). Tidak selamanya tujuan *principal* dengan *agent* sejalan karena terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, hubungan tersebut dapat terjadi pada saat *agent* bekerja untuk *principal*. Pelaporan *sustainability reporting* merupakan salah satu

cara untuk mengatasi konflik keagenan, sebab dengan menerbitkan *sustainability reporting* pihak manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak *principal*, sedangkan pihak *principal* dapat mengawasi kinerja perusahaan dari hasil yang dilaporkan pihak manajemen terkait dengan keberlanjutan perusahaan.

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa kesuksesan suatu perusahaan tidak dilihat dari suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (Freeman dan Philips, 1999). Dengan demikian perusahaan tidak terlepas dari *stakeholder*, hal tersebut diperkuat oleh argumen (Lindrawati, 2008), bahwa di mana perusahaan tersebut beroperasi maka tidak akan dapat terlepas dari norma dan peraturan yang berlaku, serta kondisi lingkungan yang ada disekitarnya. Perusahaan berdiri disebabkan kebutuhan masyarakat akan perusahaan itu, sehingga perusahaan tidak hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Jadi kegiatan operasi tidak hanya memperhatikan *shareholder* saja namun juga perlu memperhatikan *stakeholder*. Langkah yang dapat diambil yaitu dengan menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) dengan maksud untuk memberikan laporan secara lengkap dalam kaitannya dengan program sosial sehingga perusahaan dapat menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*.

Teori legitimasi erat kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya perusahaan perlu mendapatkan

legitimasi/pengesahan dari lingkungan disekitarnya, sebab seperti yang diungkapkan diatas bahwa teori legitimasi erat kaitannya dengan norma-norma masyarakat. Kegiatan operasional perusahaan akan terganggu jika nilai-nilai yang dijalankan oleh perusahaan tidak sebanding dengan nilai-nilai di masyarakat, sehingga perusahaan memerlukan kontrak sosial untuk memenuhi kepentingan stakeholder berupa laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) yang berfungsi sebagai *monitoring* kegiatan operasional perusahaan.

Pada penelitian ini menggunakan variabel independen berupa karakteristik perusahaan yang diprosikan oleh empat variabel yaitu ukuran perusahaan (*size*), likuiditas, *leverage* dan dewan direksi. Pada variabel ukuran, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi tuntutan masyarakat yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tuntutan masyarakat, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politik bagi perusahaan (Hasibuan dalam Purnasiwi, 2011). Tuntutan masyarakat untuk pertanggung jawaban sosial erat kaitannya dengan teori legitimasi yaitu pengesahan dari lingkungan sekitar perusahaan yang berhubungan dengan nilai-nilai yang dijalankan oleh perusahaan, jika nilai-nilai yang dijalankan perusahaan tidak sebanding dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat maka kegiatan operasional perusahaan akan terganggu.

Perbedaan kepentingan juga dapat timbul sesuai dengan teori keagenan bahwa akan terjadi perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent*. Untuk memenuhi kontrak sosial tersebut dan mengatasi konflik keagenan manajemen dapat mengungkapkan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) sebagai alat *monitoring* kegiatan operasional perusahaan.

Dari segi likuiditas menurut Suryono dan Prastiwi (2011) perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi berarti menandakan kemampuan yang besar untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu, sehingga perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi menandakan kinerja keuangan perusahaan tersebut baik. Kondisi keuangan yang baik akan mendorong perusahaan untuk melaporkan informasi secara lengkap, dengan demikian semakin besar kemungkinan dilaporkannya laporan keberlanjutan. Pihak manajemen yang melaporkan laporan secara lengkap maka sudah memenuhi kewajibannya terhadap *stakeholder* serta dalam rangka mendapatkan legitimasi dari lingkungan sekitar perusahaan. Salah satu cara perusahaan melaporkan informasi secara lengkap yaitu dengan pengungkapan pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) dalam rangka mewujudkan keberlanjutan usaha perusahaan.

Menurut Purnasiswi (2011), *leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk

membiyai asetnya. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan perusahaan dengan kreditur maka informasi yang dibutuhkan dalam laporan perusahaan akan semakin luas. Kreditur disini terkait dengan teori *stakeholder* bahwa perusahaan tidak hanya memperhatikan *shareholder* namun juga para *stakeholder*, dengan dipenuhinya kepentingan *stakeholder* maka legitimasi perusahaan juga terjaga, sehingga keberlangsungan hidup perusahaan terjamin. Bila dikaitkan dengan teori keagenan yang menyebutkan bahwa pihak agen memiliki kewajiban kepada pemilik perusahaan untuk melaporkan seluruh kegiatan operasi perusahaan, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah pengungkapan pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) dalam rangka mewujudkan keberlanjutan usaha perusahaan.

Variabel terakhir yang akan diteliti yaitu dewan direksi. Variabel ini berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*. Dewan direksi yang dipercaya dan bertanggung jawab penuh dalam mengurus perusahaan. Kinerja dewan direksi yang baik akan mewujudkan *good corporate governance* pada perusahaan. Menurut Suryono dan Prastiwi (2011), semakin tinggi frekuensi rapat dewan direksi menandakan komunikasi dan koordinasi yang mempermudah terwujudnya *good corporate governance*. Perusahaan yang mencapai *good corporate governance* memiliki daya tarik bagi *stakeholder*, sehingga semakin luas pengungkapan yang dilakukan.

Sesuai dengan teori keagenan dewan direksi bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen khususnya dalam pelaporan kinerja agar sesuai dengan kepentingan *principal*, dan *stakeholder* dalam rangka mewujudkan keberlanjutan usaha perusahaan yang dilakukan dengan cara pengungkapan pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*).

Penelitian yang dilakukan Suryono dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa penelitian tentang pelaporan berkelanjutan di Indonesia masih tergolong topik penelitian yang relatif jarang dilakukan, sebab di Indonesia sendiri *sustainability reporting* bersifat *voluntary* jadi tidak banyak perusahaan yang menerapkan. Pada tahun 2011 penelitian dilakukan oleh Suryono dan Prastiwi (2011) membahas mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap praktik pengungkapan *sustainability reporting*. Karakteristik perusahaan diproksikan oleh variabel *profitabilitas*, *likuiditas*, *leverage* aktivitas, ukuran perusahaan. Untuk *corporate governance* diproksikan oleh variabel komite audit, dewan direksi, *governance committee*. Pada tahun 2013 penelitian dilakukan oleh Sri dan Syam (2013) yang membahas mengenai pengaruh karakteristik perusahaan yang diproksikan pada variabel *size of firm*, *ratio of leverage*, *ratio of profitability*, dan *type of industry*. Oleh sebab itu, penelitian ini meneliti mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan pelaporan keberlanjutan pada perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan: “Apakah ukuran perusahaan (*size*), likuiditas, *leverage*, dan dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan pelaporan keberlanjutan pada perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI ?”

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan (*size*), likuiditas, *leverage* dan dewan direksi terhadap pengungkapan pelaporan keberlanjutan pada perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penenilitan ini antara lain:

### 1.4.1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas topik mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

### 1.4.2. Manfaat Praktik

a. Bagi perusahaan/Manajemen

Menjadi bahan referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan keuangan

b. Bagi *Stakeholder*

Menjadi bahan pertimbangan dan referensi tentang laporan keuangan tahunan untuk berinvestasi dengan para *stakeholder* dalam memilih perusahaan yang transparan yang mengungkapkan informasi dan memiliki kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

#### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu serta landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai keagenan, *stakeholder*, legitimasi, pelaporan keberlanjutan, dan karakteristik perusahaan. Selain itu juga dijelaskan tentang hipotesis penelitian dan model analisis penelitian.

### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang meliputi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data.

### **BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis, serta pengujian hipotesis dan pembahasan.

### **BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.